

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Realitas Bangsa Indonesia tidak hanya multi-etnis, akan tetapi juga multi-agama dan multi-ideologi. Realitas itu merupakan komitmen Bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memperkuat kembali Bangsa Indonesia yang tidak hanya berdaulat secara politik dan ekonomi, tetapi juga mengembangkan jati diri atau kebudayaan yang berpijak pada sistem nilai dan pandangan hidup Bangsa Indonesia sendiri yang “Bhineka Tunggal Ika”. Bangsa Indonesia ialah suatu konsep yang dialamatkan pada suatu komunitas sebagai kesatuan kehidupan bersama, yang mencangkup berbagai unsur yang berbeda dalam aspek etnis, kelas atau golongan sosial, sistem kepercayaan, kebudayaan, bahasa dan lain-lain<sup>1</sup>.

Pada awal perkembangannya, faham intergralistik Bangsa Indonesia dipelopori oleh organisasi Boedi Oetomo yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Meskipun Boedi Oetomo hanya mengedepankan unsur-unsur integral dalam masyarakat etnik<sup>2</sup> Jawa, yang didalamnya mencangkup seluruh penjurur Pulau Jawa (etnis Jawa dan Sunda)

---

<sup>1</sup> *Suara Muhammadiyah* tanggal 1 Mei 2008.

<sup>2</sup> Menurut Teoritikus nasional Inggris, A. D. Smith, bahwa masyarakat etnik adalah sekelompok orang yang memiliki satu nama kolektif, satu mitos asal keturunan, satu sejarah yang sama, ciri-ciri budaya yang sama (seperti bahasa dan agama), satu “tanah tempat tinggal” dan satu semangat komunal tertentu. Hans Van Miert, *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisasi dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930*, (terjemahan Sudewo Satiman, judul asli *Een Koel Hoofd En Een Warm Hart: Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indie, 1918-1930*), Hasta Mitra, Jakarta, 2003. Hal. 23.

serta Madura. Akan tetapi, kesadaran Boedi Oetomo telah merintangikan rasa solidaritas yang menembus hirarki garis-garis pemisah sosial Bangsa Indonesia. Bahkan, Boedi Oetomo berperan penting dalam merumuskan paham integralistik yang luas dari organisasi-organisasi lain setelahnya<sup>3</sup>, yakni Bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke beserta kebhinekaannya.

Selama ratusan tahun, Bangsa Indonesia berusaha keluar dari belenggu penjajahan bangsa asing tanpa memperdulikan kebhinekaannya. Kemudian, Bangsa Indonesia kurang lebih mengalami perjalanan sejarah yang sama dengan masyarakat di dunia barat, yakni Indonesia mengalami industrialisasi. Transformasi sosial menuju masyarakat industri merupakan *sunnatullah* yang tidak terelakan<sup>4</sup>. Banyak negara berkembang menerapkan strategi pembangunan seperti itu, karena industrialisasi diyakini sebagai salah satu strategi untuk mencapai kesejahteraan dan modernisasi. Sedangkan, modernisasi mendatangkan banyak perkembangan, seperti kemajuan ekonomi, perluasan dan standarisasi pendidikan, kemajuan teknologi, perbaikan infrastruktur, sarana komunikasi modern, pertumbuhan birokrasi dan perkembangan bahan baku untuk berbicara, menulis, mengelola dan memerintah<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Misalnya, Indische Partij atau Partai Hindia yang didirikan untuk menghimpun semua suku bangsa di Hindia Belanda menjadi satu nasyon terutama pada tahun 1912/1913 dan 1918/1919. Ada juga Perhimpunan Indonesia yang dipropagandakan oleh para pelajar Hindia di Negeri Belanda pada tahun 1925. Kemudian, Partai Nasional Indonesia (PNI) dipimpin oleh Soekarno pada tahun 1927. Nasionalisme Indonesia menurut tiga organisasi itu adalah perjuangan politik untuk mempersatukan seluruh penduduk pribumi Hindia Belanda dalam satu Negara Indonesia yang bebas. Hans Van Miert, *Dengan Semangat Berkorban ...* Hal. xviii-xxxiv.

<sup>4</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Mizan, Bandung, 1999. Hal. 171.

<sup>5</sup> Hans Van Miert, *Dengan Semangat berkorban ...* Hal. 22.

Industrialisasi Indonesia sudah dikenal sejak Pemerintahan Kolonial memperkenalkan tanaman-tanaman komersial di Indonesia ke negara-negara lain. Perkebunan-perkebunan besar dan pabrik-pabrik, terutama gula pada abad ke-19 sudah mengubah sebagian sektor ekonomi Bangsa Indonesia<sup>6</sup>. Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), industrialisasi hanya bertujuan jangka pendek, yakni penyeimbangan kekuatan tentara Sekutu karena Jepang terlibat peperangan melawan tentara Sekutu. Sedangkan pemerintahan Orde Lama (1945-1965) tidak begitu memberikan peran yang berarti dalam industrialisasi. Walaupun Pemerintah Indonesia pada saat itu telah memprakarsai sejumlah proyek industri, namun kebanyakan proyek tersebut tidak berjalan dengan baik karena selalu kekurangan dana, termasuk juga devisa<sup>7</sup>.

Proses industrialisasi di Indonesia ini baru mengalami perkembangan pesat pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998), karena terbukanya gelombang penanaman modal asing<sup>8</sup>. Pemerintahan ini berusaha menjalankan pembangunan-pembangunan sektor ekonomi yang sistematis. Oleh karena itu, konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) diperkenalkan sebagai strategi ekonomi Bangsa Indonesia. Tujuannya adalah bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan bersamaan dengan itu harus diletakkan dasar-dasar bagi keadilan sosial,

---

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1994. Hal 61.

<sup>7</sup> Thee Kian Wie, *Industrialisasi di Indonesia: Beberapa Kajian*, LP3ES, Jakarta, 1994. Hal. 18.

<sup>8</sup> Faktor-faktor pendorong: 1) semakin tingginya biaya lahan dan upah tenaga kerja di negara industri baru Asia, seperti Korea, Jepang, Cina, Hongkong dan Taiwan; 2) pemerintah asal investor mulai terbuka terhadap penanaman modal di luar negeri. Thee Kian Wie, *Industrialisasi di Indonesia ...* Hal. 164-165.

terutama meluasnya kesempatan kerja<sup>9</sup>. Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga meyakini sikap tidak menutup diri dari luar merupakan bagian penting dari perkembangan satu negara, yakni sesuai dengan perkembangan negara-negara di dunia<sup>10</sup>.

Proses Industrilisasi pada masa pemerintahan Orde baru dimulai secara serius sejak Repelita I (1969/1970-1973/1974). Arah umum kebijakan Industrilisasi pada Repelita I sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pembangunan jangka panjang Indonesia adalah untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang di mana industri manufaktur yang kuat dan maju didukung oleh sektor pertanian yang tangguh<sup>11</sup>. Prioritas Repelita I diberikan pada pembangunan industri-industri manufaktur yang mendukung sektor pertanian. Pada tahap selanjutnya, yakni selama Repelita II (1974/1975-1978/1979) prioritas diberikan pada pengolahan sumber daya alam; Repelita III (1979/1980-1983-1984) industri-industri yang didirikan adalah yang dapat mengolah bahan baku industri menjadi produk-produk industri manufaktur; sedangkan Repelita IV (1984/1985-1988/1989) dibangun barang-barang hasil rekayasa (barang modal)<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> *Center For Strategic and International Studies (CSIS), Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1979. Hal. 76.

<sup>10</sup> Dalam membangun ini, "kita ingin bertekad agar kita dapat menjadikan itu rumah kita sendiri, kitalah dan bukan orang lain, yang harus mampu mengurus masa depan kita sendiri, yang harus mampu menciptakan kesejahteraan yang kita cita-citakan sendiri dan yang kita wujudkan dengan kekuatan kita sendiri. Ini adalah azas yang penting. Namun, demikian ini juga sama sekali tidak berarti bahwa kita menutup diri terhadap dunia luar. Sikap demikian tidak sesuai dengan keadaan dunia di mana semua bangsa saling berhubungan, saling membutuhkan dan perlu bantu-membantu. *Center For Strategic and International Studies (CSIS), Pandangan Presiden Soeharto ...* Hal. 75.

<sup>11</sup> Thee Kian Wie, *Industrialisasi di Indonesia ...* Hal. 20.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Pada awalnya, industrialisasi hanya dipusatkan dikota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. Dalam perkembangannya, kota Jakarta, Bandung dan Surabaya menjadi padat dengan kawasan-kawasan industri. Secara bertahap, penduduk dan pemukimannya pun mengalami perkembangan yang pesat di kota-kota besar itu. Misalnya, pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Jakarta diakibatkan oleh migrasi yang melahirkan suatu masyarakat kota yang sangat kompleks menurut ukuran-ukuran kesukuan, pekerjaan serta kelompok-kelompok sosial<sup>13</sup>. Akibatnya, para pelaku sektor ekonomi industri memaksa industrilisasi berkembang di daerah-daerah sekitarnya, terutama sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura). Kemudian, industrialisasi tumbuh di kota-kota seperti Karawang, Tangerang, Cirebon, Bekasi, dan Semarang. Hal ini, selain karena faktor lahan dan bahan baku yang cukup, juga transportasi dan distribusi yang memadai.

Industrilisasi Kabupaten Karawang, mulai berkembang sekitar akhir tahun 1980-an. Industrilisasi ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan modernisasi bagi masyarakat Kabupaten Karawang. Namun, tidak semua masyarakat akan mengalami proses yang sama, kecepatan yang sama atau akibat-akibat yang sama. Oleh karena itu, industrialisasi tidak hanya membawa berkah positif, akan tetapi juga berpeluang merusak dan merombak hubungan-hubungan sosial dan memunculkan perpecahan-perpecahan atau konflik-konflik baru dalam sosial

---

<sup>13</sup> *Prisma* 6 bulan Juni 1980.

masyarakat<sup>14</sup>. Bila tidak ada dukungan sosial dan penyesuaian terhadap perubahan sosial yang terjadi, maka perubahan cenderung menghasilkan ketidakpastian, konflik serta menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat<sup>15</sup>. Pada tahap ini, industrialisasi telah membentuk tatanan dan struktur sosial baru yang sangat berbeda dengan tatanan dan struktur sosial tradisional<sup>16</sup>.

Industrialisasi Kabupaten Karawang menghendaki transformasi masyarakat setempat dari agraris ke industri. Masyarakat setempat dituntut untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan teknologi-teknologi dan ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan yang baru akibat industrialisasi. Namun, tidak semua masyarakat dapat menyesuaikan diri secara cepat, akibatnya ada ketertinggalan-ketertinggalan. Apalagi, sejarah industrialisasi di Indonesia tidak menghendaki peranan besar orang pribuminya. Peranan besar dijalankan oleh sektor swasta asing dan Cina<sup>17</sup>. Orang-orang pribumi tidak mendapat tempat dalam industri-industri besar karena masalah permodalan dan organisasinya.

Pada masa kolonial Belanda misalnya, industrialisasi terletak di tangan pemerintah kolonial dan swasta asing. Keadaan pun tidak banyak berubah pada masa pemerintahan Orde Lama. Pemerintahan ini hanya menggeser usaha-usaha modal

---

<sup>14</sup> Problem-problem sosial lain yang timbul dapat berupa kemacetan lalu lintas, tercemarnya air bersih dan udara, maraknya tindak kriminalitas, berkurangnya lahan produktif karena dijadikan pemukiman dan lain-lain.

<sup>15</sup> *Kompas* tanggal 29 Januari 1997.

<sup>16</sup> Misalnya, Kuntowijoyo memperkenalkan tahapan-tahapan kesadaran sosial dalam transformasi masyarakat agraris ke industri, yakni kawula, wong cilik, umat dan warganegara. Masing-masing tingkatan mempunyai kesadaran sosial yang berbeda-beda. Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah ...* Hal. 20-28.

<sup>17</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam...* Hal. 176.

asing ke tangan pemerintah dan swasta asing. Demikian juga pada masa Orde Baru, peranan modal swasta Timur Asing, khususnya Cina (dan militer), dalam proses industrialisasi sangat menonjol. Sehingga, masyarakat Indonesia pada umumnya tidak mengalami perubahan berarti, atau adanya ketidaksesuaian dan ketimpangan dalam struktur sosial dan ekonomi. Tanpa ada dukungan dan penyesuaian dari masyarakat, industrialisasi tidak hanya menimbulkan kesenjangan sosial, tetapi juga dapat memunculkan kerusuhan dan gejolak sosial.

Salah satu isu yang timbul dalam masyarakat industri yang belum matang adalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Isu SARA ini memang begitu sensitif bagi Bangsa Indonesia yang multietnik, multi agama dan multi-ideologi. Kebhinekaan ini juga yang menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah strategis bagi “pihak ke tiga” yang ingin menciptakan ketidakstabilan. Di antara isu SARA yang sering muncul ke permukaan adalah diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa. Bahkan, kadang-kadang diskriminasi rasial ini dibangun atas dasar kejadian yang kecil, sehingga menyebabkan anti Tionghoa.

Akhir abad ke-20 merupakan puncak dari goncangan dan gejolak sosial anti Tionghoa. Kerusuhan-kerusuhan massa anti Tionghoa terjadi di beberapa wilayah Indonesia menjelang runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada pertengahan tahun 1998. Di luar pulau Jawa misalnya, kerusuhan terjadi di beberapa daerah seperti: di Flores pada tahun 1995, di Pontianak pada tahun 1997 dan di Ujung Pandang pada



tahun 1997<sup>18</sup>. Di luar Jawa Barat misalnya, salah satu kerusuhan terjadi di daerah Situbondo<sup>19</sup>. Sedangkan di Jawa Barat misalnya, terjadi kerusuhan di daerah Purwakarta pada tanggal 1 November 1995<sup>20</sup>, Tasikmalaya pada tanggal 26-27 Desember 1996<sup>21</sup> dan Rengasdengklok pada tanggal 30 Januari 1997<sup>22</sup>.

Pada masa Orde Baru kerusuhan massa yang terjadi di beberapa daerah Indonesia bukan hal baru. Pada tahun 1970 misalnya, kerusuhan massa berturut-turut terjadi di Daerah Solo<sup>23</sup>. Kerusuhan massa anti Tionghoa juga sempat terjadi di beberapa daerah Indonesia pada awal abad ke-20. Kerusuhan-kerusuhan massa anti

---

<sup>18</sup> Faktor dominan penyebab insiden di tiga daerah ini adalah prasangka kesukuan dan keagamaan. *Republika* tanggal 24 April 1998.

<sup>19</sup> Faktor dominan insiden Situbondo adalah prasangka keagamaan. *Republika* tanggal 24 April 1998.

<sup>20</sup> Kerusuhan ini berawal dari Tindakan Karyawan Toko Serba Ada (Toserba) Nusantara terhadap Lia. Lia, yang kesehariannya berjilbab, dituduh mencuri sebatang coklat di Toserba Nusantara. Lia dipaksa mengaku, kemudian ditampar dan jilbabnya dicopot, disuruh membersihkan WC, dan diarak keliling toko sambil disuruh berteriak bahwa dirinya maling. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 15 Oktober 1995. Namun, kemarahan warga justru terjadi tanggal 31 November 1995. *Republika* tanggal 4 November 1995.

<sup>21</sup> Kerusuhan ini berawal dari isu dan selebaran tentang meninggalnya Ustadz Drs. Mahmud Farid (38 tahun) korban penganiayaan polisi pada tanggal 26 Desember 1997, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren *Riyadhul Ulum Wadda'wah*. Kerumunan terjadi di Masjid Agung pukul 09.00 WIB untuk mengadakan do'a bersama. Danrem Kol. HM Yasin, Dandim Letkol Yuyun dan Kapolres Suherman berusaha menenangkan massa. Kapolres juga sempat meminta maaf atas perilaku bawahannya. Pada pukul 11.00 WIB massa mulai keluar masjid dengan merusak markas Polres yang terletak di samping masjid, juga toko-toko, kendaraan, gereja maupun kantor-kantor polisi. *Republika* tanggal 27 Desember 1996.

<sup>22</sup> Kerusuhan ini berawal dari cecok mulut antara remaja mushala dengan seorang warga keturunan. Kamis dini hari kemarin sekitar pukul 02.30 WIB, seperti biasanya dalam bulan Ramadhan ini, sejumlah remaja di Mushala "Nurul Iman" di Kampung Warudoyong (belakang Pasar Rengasdengklok) membangunkan warga sekitarnya untuk persiapan sahur dengan menabuh bedug. Rupanya hal itu mengganggu Kho Cong Wa, yang rumahnya berada di sebelah mushala tersebut. Karena merasa terganggu, Kho Cong Wa yang biasa dipanggil Giok itu mencaci maki para remaja itu. Hal inilah yang kemudian memicu kemarahan massa yang merusak puluhan kendaraan di rusak dan di bakar, puluhan toko dan rumah penduduk di rusak dan sejumlah tempat ibadah juga di rusak dan dibakar. *Pikiran Rakyat* tanggal 31 Januari 1997.

<sup>23</sup> Insiden pertama di kenal sebagai *geger encik*. Insiden ini berawal pedagang (Arab) yang memukul tukang becak (Jawa). Insiden kedua dikenal sebagai *geger cino*, yang berawal dari insiden kecelakaan. Kedua insiden meluas menjadi kerusuhan massa berlatar belakang kesukuan. *Republika* tanggal 24 April 1998.



Tionghoa pada awal abad ke-20 terjadi di daerah Kudus, Grobogan, Purwodadi dan Solo pada akhir tahun 1918<sup>24</sup>.

Peristiwa sejarah yang terjadi di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tanggal 30 Januari 1997 adalah kerusuhan massa anti Tionghoa pada masyarakat industri yang belum matang<sup>25</sup>. Peristiwa itu tidak merenggut korban jiwa, akan tetapi harta benda, kendaraan-kendaraan, toko-toko, rumah-rumah dan tempat-tempat ibadah etnis Tionghoa di rusak dan dibakar oleh massa.

Sejak pertengahan bulan Agustus 1945, Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten karawang dikenal sebagai kota yang pernah menjadi saksi penting dalam lintasan sejarah Kemerdekaan Indonesia. Kecamatan ini adalah saksi penting berdirinya Bangsa Indonesia. Peristiwa ini berawal dari keterlambatan Sukarno dan Muhammad Hatta dalam mengantisipasi kekalahan Jepang dari Sekutu pada Perang Dunia II sekitar tahun 1945, sehingga menyebabkan ketegangan dengan kaum muda pimpinan Sukarni. Sukarno dan Muhammad Hatta menolak tuntutan untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945, maka pada tanggal 16 Agustus keduanya dibawa ke Rengasdengklok, tepatnya di rumah seorang tuan tanah keturunan Tionghoa bernama Djiauw Kie Siong. Kemudian, Sukarno dan Muhammad Hatta dipaksa menandatangani proklamasi Kemerdekaan

---

<sup>24</sup> Pada peristiwa-peristiwa kerusuhan ini, Etnis Tionghoa di mata kaum nasionalis dan pejuang kemerdekaan lainnya dianggap begundal Belanda. *Prisma* bulan Juni 1982. Hal. 87.

<sup>25</sup> Memang benar bahwa konflik-konflik hanya akan terjadi pada masa-masa transisi sebelum masyarakat industri menjadi matang. Di negeri-negeri yang tingkat industrinya sudah maju, ada kecenderungan bahwa kesamaan sosial akan terjadi dan sebaliknya, ketidaksetaraan akan menurun. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam ...* Hal. 180.

Indonesia yang akan dibacakan di rumah Sukarno, jalan pengangsaan 50 (sekarang jalan proklamasi) pagi hari tanggal 17 Agustus 1945<sup>26</sup>.

Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang mempunyai peranan penting dalam proses integral unsur-unsur Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan. Kecamatan Rengasdengklok merupakan titik awal lahirnya proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, ketika lepas dari perhatian Bangsa Indonesia, Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang justru kembali muncul kepermukaan membawa pesan disintegrasi unsur-unsur Bangsa Indonesia pada awal tahun 1997, yakni kerusuhan dan gejolak sosial antara “mayoritas” dan “minoritas” bermotif anti Tionghoa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik dengan peristiwa kerusuhan di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tanggal 30 Januari 1997. Kajian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang sejarah lokal yang di tiap daerah mempunyai kekhasan sendiri yang otonom<sup>27</sup>. Untuk penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul: “PERISTIWA RENGASDENGKLOK: KERUSUHAN MASSA BERNUANSA SARA PADA TANGGAL 30 JANUARI 1997”.

---

<sup>26</sup> Lihat Adam Malik, *Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945*, Widjaya, Jakarta, 1970.

<sup>27</sup> Sejarah lokal dalam bentuknya yang mikro telah tampak dasar-dasar dinamikanya, sehingga peristiwa-peristiwa sejarah dapat diterangkan melalui dinamika internal yang di tiap daerah mempunyai kekhasan sendiri yang otonom. Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003. Hal. 156.

## **B. Perumusan Masalah**

Tulisan ini memfokuskan pembahasannya pada peristiwa kerusuhan massa di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tanggal 30 Januari 1997. Dini hari pada tanggal 30 Januari 1997, yang bertepatan dengan Bulan Ramadhan, merupakan waktu dibangunnya isu anti Tionghoa di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Kemudian, pada akhir bulan Januari 1997 itu juga, massa melakukan aksi sepihaknya terhadap minoritas warga keturunan Tionghoa di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Adapun perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa fakto-faktor yang menyebabkan kerusuhan massa di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tanggal 30 Januari 1997?
2. Bagaimana proses terjadinya kerusuhan massa di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tanggal 30 Januari 1997?
3. Bagaimana dampak kerusuhan massa di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tanggal 30 Januari 1997?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah penulis utarakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kerusuhan massa di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tanggal 30 Januari 1997?

2. Untuk mengetahui proses terjadinya kerusuhan massa di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tanggal 30 Januari 1997?
3. Untuk mengetahui dampak kerusuhan massa di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tanggal 30 Januari 1997?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan terhadap sejarah lokal.
2. Sebagai tambahan informasi sejarah lokal bagi masyarakat luas.
3. Sebagai bahan pertimbangan agar pemerintah memperhatikan keadilan sosial bagi masyarakat di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian sejarah (MPS). MPS adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis<sup>28</sup>. Pada umumnya, MPS mempunyai empat tahapan penelitian, sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999. Hal. 43-44.

## 1. Tahapan Heuritik

Pada tahapan ini, penulis berusaha mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti, seperti buku-buku, koran-koran dan dokumen-dokumen. Sumber-sumber itu tersimpan di beberapa tempat, diantaranya Balai Iklan Pikiran Rakyat, di Jalan Kopo Bandung; Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan Raya A.H. Nasution Bandung; Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jalan Sukarno Hatta Bandung; Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang, Jalan Ahmad Yani (Bypass) Karawang; Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang, di Jalan Ahmad Yani (Bypass) Karawang; Arsip Daerah Kabupaten Karawang, Jalan Ahmad Yani (Bypass) Karawang; Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Karawang, Jalan Soeroto Koento Karawang; dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya Jakarta.

Penulis memperoleh sumber primer dari mereka yang mengalami dan menyaksikan peristiwa secara langsung atau dengan tokoh yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini. Pelaku-pelaku peristiwa yang berhasil diwawancarai oleh penulis, diantaranya:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Alamat	Jabatan
1.	Aep S.	Laki-laki	55 Tahun	Warudoyong Utara RT 38 RW 08	Ketua Rukun Warga (RW) 08
2.	Azis	Laki-laki	38 Tahun	Warudoyong Utara RT 37 RW 08	Ketua Rukun Tetangga (RT) 37
3.	Saly Setiawan	Laki-laki	29 Tahun	Warudoyong Utara RT 37 RW	Penyiar Radio Gema Proklamasi

				08	
4.	Sony Fakhrimulya	Laki-laki	28 Tahun	Jl. Perinstis Proklamasi	Penyiar Radio Gema Proklamasi
5.	Jaya Pasa	Laki-laki	50 Tahun	Rengasdengklok	Sekretaris Kecamatan 2008
6.	Hendra	Laki-laki	29 Tahun	Karangpawitan-Karawang Kota	Pengurus Korcab Pramuka Karawang

Kemudian, penulis memperoleh sumber primer berupa tulisan-tulisan. Surat kabar yang diperoleh dari Balai Iklan Pikiran Rakyat, diantaranya:

1. Pikiran Rakyat, tanggal 31 Januari 1997, “Rengasdengklok Rusuh”, “Rengasdengklok Dulu dan Kini” dan “KSAD Sesalkan Kasus Rengasdengklok”.
2. Pikiran Rakyat, tanggal 1 Februari 1997, “Pangdam: Masih Diperiksa 11 Perusuh Rengasdengklok”.
3. Pikiran Rakyat, tanggal 3 Februari 1997, “MUI Karawang Sesalkan Rusuh di Rengasdengklok” dan “Hadapi Perusuh Tindakan Petugas Akan Lebih Luas”.

Sumber primer berupa surat kabar-surat kabar juga, penulis peroleh di Perpustakaan Daerah Jawa Barat, diantaranya:

1. Kompas, tanggal 1 Februari 1997, “Panglima ABRI: Pelaku Kerusuhan itu Anti Pemerintah”, dan “Fantasi Revolusi dan Rengasdengklok: Rengasdengklok dalam Kontroversi Lintasan Sejarah”.

2. Kompas, tanggal 19 Februari 1997, “Komplek, ada keterkaitan berbagai kerusuhan”.
3. Republika, tanggal 21 April 1997, “26 Terdakwa Pelaku Kerusuhan Rengasdengklok Divonis 2-3 Bulan”.

Sumber primer berupa surat kabar-surat kabar lainnya, penulis peroleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, diantaranya:

1. Antara, 14 Juni 1946, “Karawang Membantu Pengungsi Tionghoa Tangerang”.
2. Antara, tanggal 20 Juni 1946, “Pembentukan Panitia Pengungsi Tionghoa”.
3. Antara, tanggal 21 Juni 1946, “Usaha Menyokong 5000 Pengungsi Tionghoa”.

Sedangkan, data-data statistika yang dijadikan sumber primer diperoleh dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang, diantaranya :

1. *Kabupaten Karawang Dalam Angka 1987* ditulis oleh Tim dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang tahun 1988.
2. *Kabupaten Karawang Dalam Angka 1996* ditulis oleh Tim dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang tahun 1997.
3. *Kabupaten Karawang Dalam Angka 1997* ditulis oleh Tim dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang tahun 1998.
4. *Potensi Desa Kabupaten Karawang 1990* ditulis oleh Tim dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang tahun 1992.



5. *Kecamatan Rengasdengklok Dalam Angka 1998* ditulis oleh Tim dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang tahun 1999.
6. *Kabupaten Karawang Dalam Angka 1999* ditulis oleh Tim dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang tahun 2000.
7. *Kecamatan Rengasdengklok Dalam Angka 2000* ditulis oleh Tim dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang tahun 2002.
8. *Statistika Upah Buruh Tani Di Pedesaan pada tahun 1997-2003* di tulis oleh Tim dari Sub Direktorat Statistika Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan, Jakarta.

Selain sumber primer, penulis juga memperoleh sumber-sumber sekunder dalam bentuk buku-buku, diantaranya:

1. *Sejarah Singkat: Hari Jadi Kabupaten Karawang Berikut Silsilah dan Urutan Para Bupatinya*, ditulis oleh tim dari Arsip dan Kepustakaan Kabupaten Karawang tahun 2004.
2. *Sejarah Singkat: Hari Jadi Kabupaten Karawang Berikut Silsilah dan Urutan Para Bupatinya*, ditulis oleh tim dari Arsip dan Kepustakaan Kabupaten Karawang tahun 2007.
3. *Sejarah Berdirinya Kabupaten Karawang 10 Maulud Taun Alip 14 September 1633*, ditulis oleh Cecep Supriadi dan diterbitkan Theme 76 Bandung tahun 1994.
4. *Sejarah Perjuangan Masyarakat Karawang dan Sekitarnya 1945-1950*, ditulis oleh tim dari Pemda Kabupaten Karawang tahun 2003.

5. *Sejarah Perjuangan Soeroto Koento Bersama Masyarakat Karawang*, ditulis oleh tim dari Pemda Kabupaten Karawang tahun 2006.

Untuk sumber berupa peta dan foto, diantaranya:

1. Peta Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997.
2. Foto polisi yang sedang berbaris pada kerusuhan massa Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997.
3. Foto tentara sedang berbicara dengan seorang warga dan kepulan asap saat kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997.
4. Foto sebuah mobil yang terbalik dan kepulan asap dari biara yang dibakar saat kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997.
5. Foto tentara dengan tameng dan pentungan berjaga-jaga di depan sebuah rumah bertuliskan “Rumah Muslim Islam” setelah kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997.
6. Foto tulisan “Cina Usir” di biara yang rusak setelah kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997.
7. Foto suasana di daerah pertokoan dan tulisan “Keluarga Muslim” setelah kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997.

8. Foto gerobak sampah, garis polisi dan rumah yang rusak setelah kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997.
9. Foto seorang wartawan yang sedang memotret patung Budha yang digantung di pintu gerbang Biara Asutya Adhiguna yang rusak dan dibakar pada kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997.
10. Foto patung Buddha yang digantung disebuah kuil yang dibakar pada kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997.
11. Foto beberapa pemilik toko dan rumah melindungi propertinya dengan tulisan pada kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997.

## **2. Tahapan Kritik**

Pada tahapan ini, penulis berusaha untuk melakukan kritik terhadap sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh pada tahapan heuristik. Kritik ini dilakukan penulis terhadap sumber lisan dan tulisan, baik yang primer maupun yang sekunder. Tujuan penulis melakukan kritik adalah menemukan berbagai informasi sekitar kerusuhan massa bernuansa SARA di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tanggal 30 Januari 1997.

Penulis melakukan kritik intern dan ektern. Kritik intern digunakan penulis untuk menetapkan kredibilitas terhadap sumber-sumber lisan. Kritik intern dilakukan dengan cara membandingkan antara isi materi sumber-sumber lisan, sumber tulisan dan sumber visual, sehingga kredibilitas diperoleh dari sumber-sumber lisan. Sedangkan, kritik ektern digunakan penulis untuk mencari keautentikan sumber (kemurnian), yakni utuh atau telah berubah. Kritik ektern dilakukan dengan cara melihat segi fisik sumber-sumber sejarah.

Informasi sekitar kerusuhan di Kota Kecamatan Rengasdengklok pada tanggal 30 Januari 1997 diperoleh pemerintahan dan masyarakat. Satu pendapat dari narasumber pihak pemerintahan Kecamatan Rengasdengklok, yakni Jaya Pasa (50) dipandang cukup dipercaya karena secara materi dan ingatannya masih baik. Kemudian, Sali Setiawan (29), Sony Fakhrimulya (28), dan Hendra (29) sebagai masyarakat (pemuda) juga dipandang karena secara materi dan ingatannya pun cukup baik. Sementara itu, narasumber lain, yakni Aep (55) dan Azis (39) tidak memiliki kemampuan untuk mengingat kembali peristiwa kerusuhan di Kota Kecamatan Rengasdengklok pada tanggal 30 Januari 1997.

Sumber-sumber lisan itu diperkuat oleh sumber-sumber tulisan berupa surat kabar-surat kabar yang difotokopi dari Balai Iklan Pikiran Rakyat, diantaranya: *Pikiran Rakyat* tanggal 31 Januari 1997; *Pikiran Rakyat* tanggal 1 Februari 1997; dan *Pikiran Rakyat* tanggal 3 Februari 1997. Ada juga surat kabar-surat kabar yang difotokopi dari Perpustakaan Jawa Barat, diantaranya: *Kompas* tanggal 1 Februari 1997; *Kompas* tanggal 19 Februari 1997; dan *Republika* tanggal 21 April 1997. Surat

kabar yang tersimpan di Balai Iklan Pikiran Rakyat dan Pepustakaan Jawa Barat merupakan sumber primer yang dibuat dengan rentang waktu yang dekat dengan peristiwa, oleh karena itu, informasi yang diberikannya *credible*.

Selain diperkuat oleh surat kabar-surat kabar, sumber lisan juga diperkuat oleh sumber visual, diantaranya: foto polisi yang sedang berbaris pada kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997; foto tentara sedang berbicara dengan seorang warga dan kepulan asap saat kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997; foto sebuah mobil yang terbalik dan kepulan asap dari biara yang dibakar saat kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997; foto tentara dengan tameng dan pentungan berjaga-jaga di depan sebuah rumah bertuliskan “Rumah Muslim Islam” setelah kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997; foto tulisan “Cina Usir” di biara yang rusak setelah kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997; foto suasana di daerah pertokoan dan tulisan “Keluarga Muslim” setelah kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997; foto gerobak sampah, garis polisi dan rumah yang rusak setelah kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997; foto seorang wartawan yang sedang memotret patung Budha yang digantung di pintu gerbang Biara Asutya Adhiguna yang rudak dan dibakar pada saat kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997; foto patung Buddha yang digantung disebuah kuil yang dibakar pada kerusuhan Kota Kecamatan

Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997; dan foto beberapa pemilik toko dan rumah melindungi propertinya dengan tulisan pada saat kerusuhan Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997. Foto-foto itu merupakan sumber primer yang dibuat pada zamannya, oleh karena itu, informasi yang diberikannya juga *credible*.

Sumber lain yang digunakan dalam tulisan ini berupa buku-buku. Informasi tentang kehidupan sosial, politik, agama dan ekonomi penduduk Kabupaten Karawang terdapat dalam *Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 1987*; *Kabupaten Karawang Dalam Angka 1996*; *Kabupaten Karawang Dalam Angka 1997*; *Potensi Desa Kabupaten Karawang 1990*; *Kecamatan Rengasdengklok Dalam Angka 1998*; *Kabupaten Karawang Dalam Angka 1999*; *Kecamatan Rengasdengklok Dalam Angka 2000*; dan *Statistika Upah Buruh Tani Di Pedesaan pada tahun 1997-2003*.

Kemudian, Informasi tentang kehidupan sosial, politik, agama dan ekonomi penduduk Kabupaten Karawang diperkuat juga oleh buku-buku dengan judul *Sejarah Singkat: Hari Jadi Kabupaten Karawang Berikut Silsilah dan Urutan para Bupati* tahun 2004; *Sejarah Singkat: Hari Jadi Kabupaten Karawang Berikut Silsilah dan Urutan Para Bupati* tahun 2007; *Sejarah Berdirinya Kabupaten Karawang 10 Maulud Taun Alip 14 September 1633*; *Sejarah Perjuangan Masyarakat Karawang dan Sekitarnya 1945-1950*; dan *Sejarah Perjuangan Soeroto Koento Bersama Masyarakat Karawang*.

Di samping itu, ada surat kabar-surat kabar yang ditulis secara langsung dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, diantaranya: *Antara* tanggal 14 Juni 1946; *Antara* tanggal 20 Juni 1946; dan *Antara* tanggal 21 Juni 1946. Surat kabar-surat kabar ini memberikan informasi tentang seluk beluk kedatangan etnis Tionghoa ke Kabupaten Karawang, khususnya pada masa Perang Kemerdekaan. Kemudian, diperkuat juga oleh buku berjudul *Muslim Tionghoa Chengho: Misteri Perjalanan Muhibah Chengho* dan *Negara dan Etnis Tionghoa*, yang membahas seluk-beluk Etnis Tionghoa di Indonesia.

### 3. Tahapan Interpretasi

Tahapan interpretasi adalah tahapan penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang telah melalui tahapan heuristik dan kritik. Penulis akan berusaha merekonstruksi masa lalu itu, sehingga tampak jejak-jejak sejarahnya. Pada tahapan ini, penulis mencoba memahami persoalan ini dengan meminjam konsep tentang kerusuhan dan gejolak sosial pada masa industrialisasi<sup>29</sup>.

Secara umum, industrialisasi adalah sistem yang diterapkan dalam usaha-usaha produksi. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, industrialisasi diartikan sebagai usaha menghidupkan industri supaya jadi pokok penghidupan negara<sup>30</sup>. Industrialisasi

---

<sup>29</sup> Konsep ini dipinjam dari judul artikel yang ditulis Tadjoedin Noer Effendi, yang membahas tentang sebab-musabab renteran kerusuhan yang terjadi di Indonesia menjelang akhir abad ke-20. Lihat, *Kompas* tanggal 29 Januari 1997.

<sup>30</sup> Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982. Hal. 380.



dianggap sebagai satu-satunya jalan pintas untuk meretas nasib kemakmuran negara secara lebih cepat dibandingkan apabila tanpa melalui proses tersebut<sup>31</sup>.

Secara istilah, industrialisasi adalah pergeseran strategi pembangunan ekonomi dari semula terkonsentrasi pada sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri dan jasa)<sup>32</sup>. Dalam perspektif barat, pengertian industrilisasi lebih menekankan kepada mekanisme yang memungkinkan negara terbelakang mentransformasikan struktur perekonomian negara mereka dari sesuatu yang berat ke pertanian tradisional, untuk mencukupi kebutuhan sendiri, kepada sesuatu perekonomian yang lebih modern, lebih mengarah ke kota, dan lebih beraneka di bidang industri dan jasa<sup>33</sup>. Dalam sudut pandangan ini, sebuah indutsrialisasi bukannya pergeseran aktifitas ekonomi ataupun jumlah yang berhasil diakumulasi, melainkan yang lebih ditekankan adalah apakah pada saat yang bersamaan faktor-faktor lain yang terlibat dalam proses tersebut juga ikut bergeser, seperti tenaga kerja, modal dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

Dalam konteks keindonesiaan dan lokal, pengertian industrialisasi dipandang sebagai gejala universal<sup>34</sup>, seperti indutrialisasi yang terjadi di negara-negara Eropa. Menurut Kuntowijoyo<sup>35</sup>, pengertian indutsrialisasi tidak lepas dari kata dasar industri, yakni usaha kolektif yang dikelola oleh penerapan metode ilmu pengetahuan atau

---

<sup>31</sup> Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000. Hal. 59.

<sup>32</sup> Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran ...* Hal. 60.

<sup>33</sup> Pendapat ini adalah teori pembangunan model neoklasik barat. Lihat, Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran ...* Hal. 64-65.

<sup>34</sup> Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu*, Teraju, Jakarta, 2004. Hal. 69.

<sup>35</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam ...* Hal. 173.

semangat ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, industrialisasi terjadi bila metode ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan dalam masyarakat. Untuk memasuki sebuah masyarakat industri bukan institusionalnya saja yang diperlukan, akan tetapi juga perubahan kesadaran masyarakat dan perorangan.

Strategi industrialisasi di Indonesia di mulai secara terencana sejak tahun 1969<sup>36</sup>. Strategi industrialisasi di Indonesia dipilih karena dua pertimbangan, yakni: *pertama*, pada tahun-tahun tersebut negara-negara seluruh dunia mengerjakan industrialisasi di negaranya masing-masing dengan dukungan teori-teori pembangunan yang memadai; *kedua*, sejarah negara-negara yang telah berhasil memajukan ekonominya selalu melewati tahapan industrialisasi pada proses pembangunannya.

Industrialisasi Kabupaten Karawang tumbuh pesat sekitar akhir tahun 1980-an. Hal ini disebabkan sentralisasi pembangunan-pembangunan industri kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Kota Jakarta, Bandung dan Surabaya yang telah mengalami titik puncaknya. Pembangunan sektor ekonomi industri diikuti oleh pertumbuhan kawasan pemukiman penduduk yang pesat, sehingga menghambat pembangunan internal sektor ekonomi industri di Kota Jakarta, Bandung dan Surabaya. Oleh karena itu, pembangunan sektor ekonomi industri dialihkan ke daerah-daerah disekitarnya, terutama sepanjang jalur Pantai Utara Jawa (Pantura). Salah satunya adalah Kabupaten Karawang.

---

<sup>36</sup> Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran ...* Hal. 60.

Kabupaten Karawang tidak hanya memiliki potensi ekonomi sebagai lumbung padi di Jawa Barat, akan tetapi telah tumbuh juga sektor ekonomi industri. Sektor ekonomi industri di Kabupaten Karawang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Namun, tidak semua masyarakat tidak dapat menyesuaikan diri secara cepat dengan transformasi teknologi dan ilmu pengetahuan akibat industrialisasi. Sehingga, industrialisasi tidak hanya menimbulkan kesenjangan sosial, sekaligus membawa akibat bermacam-macam, seperti kerusuhan dan gejolak sosial.

Kuntowijoyo misalnya, menempatkan kesenjangan ekonomi sebagai faktor dominan yang melatarbelakangi kerusuhan-kerusuhan<sup>37</sup>. Pendapat Kuntowijoyo ini dipertegas oleh pendapat Tadjoedin Noer Effendi<sup>38</sup>, bahwa konflik (kerusuhan dan gejolak sosial serta amuk massa) muncul tidak hanya sebagai akibat adanya ketidaksesuaian dan ketimpangan dalam struktur sosial dan ekonomi, tetapi juga karena kelompok yang berkuasa berusaha mengontrol kepentingan kelompok subordinasi (miskin) dan berusaha membenarkan kelangsungan dominasi mereka. Untuk mempertahankan hubungan sosial antara yang mendominasi dan subordinasi tetap dapat berlangsung dibutuhkan kerelaan berkorban dari pihak yang ter subordinasi. Bila kelompok subordinasi tidak rela berkorban maka cenderung timbul konflik yang dapat memacu gelombang kerusuhan dan gejolak massa.

---

<sup>37</sup> Kerusuhan-kerusuhan di Sampit, Maluku dan Poso kebanyakan pasti disebabkan kesenjangan ekonomi. Pendapat Kuntowijoyo diperkuat oleh ayat-ayat dua ayat Al Quran, yaitu: Q.S. Al Haysr (59): 7 yang berbunyi, “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu”, dan Q.S. Al Zukhruf (43): 32 yang berbunyi, “apakan mereka (yang berhak) membagikan rahmat Tuhanmu?”. Lihat Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu ...* Hal. 110.

<sup>38</sup> *Kompas* tanggal 29 Januari 1997.

Gejala kerusuhan yang sering muncul dalam proses sejarah, pada umumnya terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami situasi krisis sebagai akibat dari proses perubahan-perubahan yang mendesak baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dan kultural<sup>39</sup>. Kerusuhan dan kekerasan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk reaksi sosial terhadap proses perubahan-perubahan yang membawa krisis adaptasi<sup>40</sup>. Peristiwa kerusuhan memiliki ciri yang umum, sifatnya yang massal, kolektif, muncul secara spontan dan sporadis, endemis, tempo kerusuhan yang singkat, cenderung menggunakan aksi kekerasan (*violence*), *brutal*, *bringas*, *vandalistik* dan *destruktif*<sup>41</sup>.

Kecamatan Rengasdengklok adalah salah satu kecamatan yang menerima dampak negatif dari industrialisasi yang tumbuh di Kabupaten Karawang berupa ketidamerataan kesejahteraan. Industrialisasi yang semata-mata sebuah sistem usaha-usaha produksi, kemudian mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, termasuk pengalaman kerusuhan dan gejolak sosial serta amuk massa di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

Pada hakekatnya, kerusuhan Rengasdengklok merupakan kerusuhan yang terjadi di wilayah tingkat kota kecamatan, atau kota kecil. Kerusuhan itu bersifat lokal dan berlangsung dalam waktu singkat, akan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat dahsyat. Kerusuhan itu juga banyak membawa kerugian material yang tidak

---

<sup>39</sup> *Ulumul Qur'an* : Jurnal kebudayaan dan Peradaban, Cipta Prima Budaya, Jakarta, 1997. Hal. 10.

<sup>40</sup> *Ulumul Qur'an* : Jurnal kebudayaan dan ... Hal. 22.

<sup>41</sup> Dibalik aksi kekerasan yang kadang-kadang sadis vandalistik dan destruktif itu tersirat adanya ungkapan pelampiasan rasa ketidakpuasan, kedendaman, kejengkelan, kegelisahan dan prustasi. *Ulumul Qur'an* : Jurnal kebudayaan dan ... Hal. 8.

sedikit. Kemudian, secara psikologis pun masyarakat merasa cemas dan khawatir terhadap ancaman yang ditimbulkan kerusuhan itu<sup>42</sup>.

Setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terciptanya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial, termasuk munculnya peristiwa kerusuhan massa dan gejolak sosial di Kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Namun, kerusuhan massa dan gejolak sosial ini memperkuat kembali gagasan-gagasan integralistik Bangsa Indonesia secara keseluruhan, terutama di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, gagasan konsiliasi<sup>43</sup> muncul setelah peristiwa itu. Dengan demikian, semboyan “Bhineka tunggal Ika” lebih merupakan suatu cita-cita yang harus masih diperjuangkan oleh segenap Bangsa Indonesia daripada sebagai kenyataan yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

#### 4. Tahapan Penulisan

Penulisan merupakan tahapan akhir dari MPS yang berupa penyusunan laporan hasil penelitian sejarah. Penyusunan laporan ini mempunyai tiga bagian, yaitu pengantar, hasil penelitian dan simpulan. Langkah-langkah penulisannya, sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> *Ulumul Qur'an : Jurnal kebudayaan dan ...* Hal. 9.

<sup>43</sup> Konsiliasi adalah bentuk pengendalian konflik tahap pertama, yang terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Jika konsiliasi tidak efektif, maka dipakai bentuk pengendalian konflik selanjutnya, yang berupa mediasi dan arbitrase. Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hal. 22-25.

Bagian pengantar diisi dengan bab pertama atau pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah (yang berupa lintasan sejarah), rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan langkah-langkah penelitian.

Hasil penelitian disajikan dalam dua bab berikutnya, yang merupakan satu rangkaian tidak terpisahkan di antara keduanya. Pada bab kedua, kondisi masyarakat Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 1997, yang akan membahas latar belakang atau masyarakat pribumi yang membahas keadaan geografi, penduduk dan kehidupan sosial, pekerjaan dan penghasilan dan pertanian dan pemilikan; dan masyarakat non pribumi yang membahas awal kedatangan Etnis Tionghoa, Etnis Tionghoa dan kehidupan sosial, pekerjaan dan penghasilan dan perdagangan dan penguasaan ekonomi. Selanjutnya, membahas hubungan Etnis Tionghoa dengan warga pribumi.

Bab ketiga, kerusuhan kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tanggal 31 Januari 1997, meliputi faktor-faktor penyebab yang membahas kesenjangan ekonomi, aparat pemerintahan yang tidak adil, sikap eksklusifisme orang-orang Tionghoa dan reaksi Etnis Tionghoa terhadap pribumi di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Selanjutnya, aksi kerusuhan kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tanggal 30 Januari 1997 yang membahas awal kerusuhan dan amuk massa; aksi peredaman kerusuhan kota Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tanggal 30 Januari 1997, yang membahas aksi pembubaran massa dan aksi blokir jalan; dan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang,

yang meliputi dampak sosial-ekonomi dan keagamaan terhadap masyarakat Kecamatan Rengasdengklok; dan reaksi pemerintah terhadap masyarakat Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, membahas dialog pemerintah dengan masyarakat, Posko Kewaspadaan Nasional, dan tindakan pemerintah terhadap para pelaku kerusuhan.

Bab keempat atau kesimpulan. Bagian ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan yang membahas tentang keumuman dan saran dari yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

